

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Disusun Oleh:

**IRPAN TANDIBUA'**

**4519013037**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

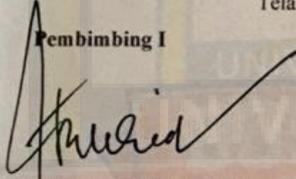
**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Pengaruh penerapan Akuntansi sector publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara  
Nama Mahasiswa : Irpan Tandibua'  
Stambuk/NIM : 4519013037  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
H. Muhammad Idris, SE.,M.Si

  
Faridah, SE.,M.Si,Ak.,CA

**Mengetahui dan Mengesahkan :**

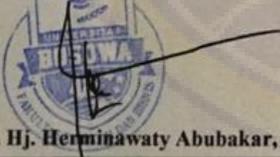
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

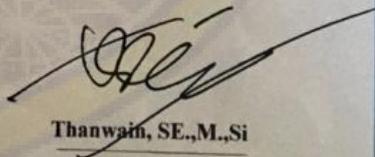
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Ketua Program Studi**

**Universitas Bosowa**

**Akuntansi**

  
Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE.,M.,Si

  
Thanwain, SE.,M.,Si

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KOERSINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRPAN TANDIBUA'

NIM : 4519013037

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Pengaruh penerapan Akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 6 Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Irpan Tandibua'

## PRAKATA

SHALOM

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha pengasih atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA”** Skripsi ini merupakan tugas wajib untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian serta penulisan tugas akhir ini tidak akan terlaksana sebagai mana yang diharapkan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menghanturkanterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai setiap Langkah kehidupan penulis, yang setia menjadi sumber kekuatan dan pengharapan yang kekal dan abadi. Terima kasih untuk setiap kesempatan mengadu dan mengucap syukur untuk semua hal yang boleh terjadi.
2. Orang Tua terkasih, Ayahanda Daniel Pabisa dan Ibunda Marlina Pare' yang telah memberikan segalanya serta kesabarannya menantikan anak pertamanya menjadi sarjana, kalian hebat kalian luar biasa kalian adalah semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr.Hj.Herminawaty Abubakar, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

4. Thanwain SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa sekaligus Penasehat Akademik dan segenap dosen serta staff Fakultas Ekonomi yang sangat berjasa dalam menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.
5. Bapak H. Muhammad Idris, SE.,M.Si dan Ibu Faridah, SE., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Drs. Paris Salu, SH.,M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara khususnya pada Bapak Yunus Sumule Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan pada penelitian ini.
8. Saudara-saudara terkasih Gade, Agen, Cika yang selalu mendoakan, memberikan semangat dukungan sampai saat ini.
9. Jeslin, putri, Alya, Sheren, Ikawati yang dari awal penyusunan skripsi sampai akhir penyusunan skripsi telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih buat Keluarga Lorong BTN Angkatan laut, Rumah kebanggan Angkatan PFTbarana24, Ikaskibar Makassar , Puri yuhana house, kontrakan Rindini house, Kost Oma dirgantara 10, kost wessabe yang selalu menerima penulis selama berproses di Makassar.

11. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Universitas Bosowa, terkhusus kelas Akuntansi B yang telah menjadi keluarga baru untuk penulis selama berproses di Universitas Bosowa.

12. And The Last, Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan Doa nya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah lupakan, semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini menjadi berkat. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak celah, kekeliruan, dan kekurangan. Oleh kaarena itu peneliti akan sangat berterima kasih atas setiap koreksi, saran, masukan maupun petunjuk yang bersifat konstruktif untuk kelanjutan penyusunan yang jauh lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap dengan selesainya penulisan dan penyusunan skripsi ini maka dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pengetahuan semua pihak yang turut membaca, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan bagi pembangunan Daerah secara umum.

Makassar, 6 Juli2023

Penulis

## **ABSTRAK**

**IRPAN TANDIBUA'. 2023. Skripsi. Pengaruh penerapan Akuntansi sector publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara dibimbing oleh H. Muhammad Idris, SE., M.Si sebagai Pembimbing Skripsi I dan Faridah, SE.,M.Si,Ak.,CA sebagai pembimbing Skripsi II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Toraja Utara . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis linier sederhana . Data yang diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dan kuesioner yang disebar kepada 24 responden. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tana Toraja yang berjumlah 24 responden dan sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah yang berjumlah 24 OPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Kejelasan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja .

**Kunci Kunci : Akuntansi sektor publik , Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah.**

## **ABSTRACT**

***IRPAN TANDIBUA'. 2023. Thesis. The effect of the application of public sector accounting on the performance accountability of government agencies at the Regional Revenue Agency of North Toraja Regency was supervised by H. Muhammad Idris, SE., M.Si as Thesis Supervisor I and Faridah, SE., M.Si, Ak., CA as Thesis Supervisor II.***

*This study aims to determine the effect of the implementation of the public accounting sector on the performance accountability of government agencies in North Toraja Regency. The type of research used in this research is quantitative research using simple linear analysis methods. Data obtained through observation, literature study, and questionnaires distributed to 24 respondents. The population and sample in this study were the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Tana Toraja Regency, totaling 24 respondents and the sample in this study were Regional Revenue Agencies, totaling 24 OPD.*

*The results of this study indicate that the implementation of the public accounting sector has a positive effect on the accountability performance of government agencies in Tana Toraja Regency. The conclusion of this study is the clarity of the implementation of the public accounting sector affects the Accountability of the Performance of Local Government Agencies in Tana Toraja Regency.*

***Keys: Public sector accounting, Performance Accountability, Government Agencies.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KOERSINILAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Lingkup Pembahasan .....	4
F. Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Teori .....	7
1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
a. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	7
b. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	8
c. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	10
2. Akuntansi Sektor Publik .....	10
a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	10
b. Jenis Akuntansi Sektor Publik .....	11
c. Indikator Akuntabilitas Sektor Publik.....	12

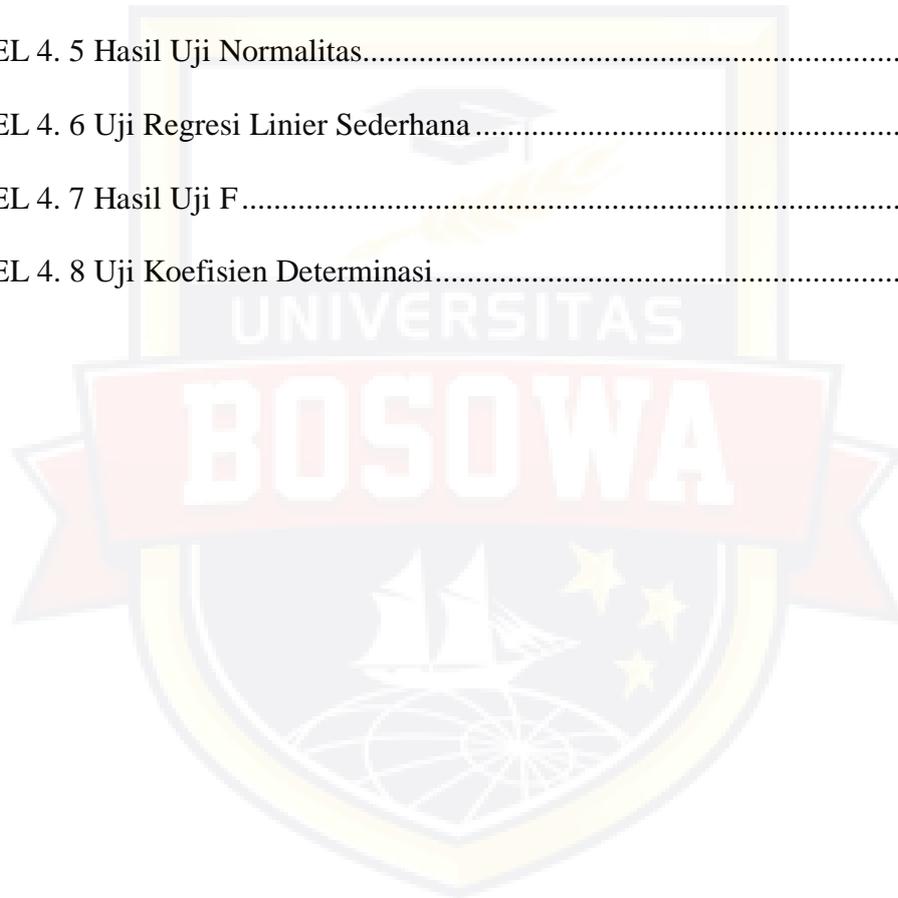
d. Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	13
e. Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik .....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	14
C. Kerangka Pikir .....	17
D. Hipotesis.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	20
1. Lokasi Penelitian.....	20
2. Waktu Penelitian .....	20
C. Populasi dan Sampel .....	21
D. Instrumen Penelitian.....	21
E. Variabel Penelitian.....	22
F. Jenis dan Sumber Data.....	22
G. Teknik Pengumpulan Data.....	23
H. Teknik Analisis Data.....	24
1. Uji Asumsi Klasik .....	25
2. Regresi Linier Sederhana .....	25
3. Uji Hipotesis.....	26
I. Definisi Operasional.....	26
J. Jadwal Penelitian.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.....	29
2. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara .....	30
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara	30
B. Deskripsi Data Responden .....	44
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	46
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	46
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47

D. Uji Analisi Regresi Linier Sederhana .....	48
E. Hasil Uji Hipotesis .....	49
F. Hasil dan Pembahasan.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

TABEL 4. 1 PENGEMBALIAN KUESIONER.....	45
TABEL 4. 2 JENIS KELAMIN RESPONDEN.....	45
TABEL 4. 3 PENDIDIKAN RESPONDEN.....	46
TABEL 4. 4 MASA KERJA.....	46
TABEL 4. 5 Hasil Uji Normalitas.....	47
TABEL 4. 6 Uji Regresi Linier Sederhana.....	48
TABEL 4. 7 Hasil Uji F.....	49
TABEL 4. 8 Uji Koefisien Determinasi.....	50



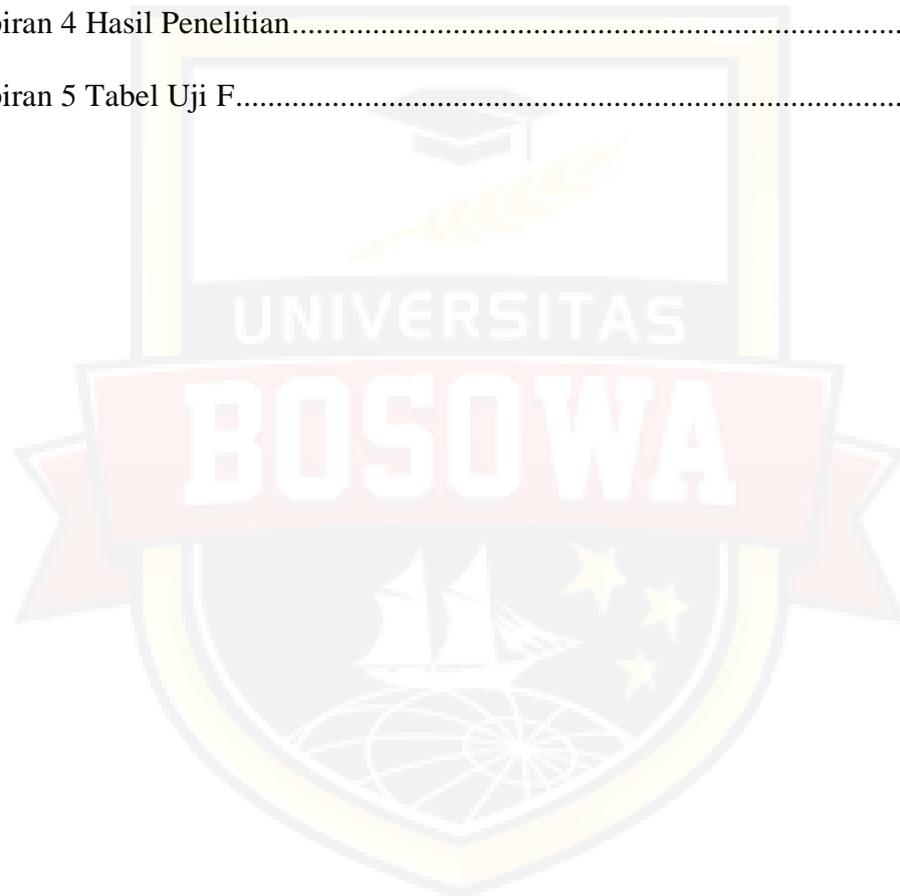
## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 Kerangka Pikir.....	17
GAMBAR 4. 1 Struktur Organisasi.....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	56
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	56
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	59
Lampiran 3 Data Hasil Penelitian Variabel .....	67
Lampiran 4 Hasil Penelitian.....	69
Lampiran 5 Tabel Uji F.....	71



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu akuntansi sektor publik di Indonesia semakin kesini semakin berkembang, terutama digunakan sebagai suatu alat pengawasan dan pelaporan dalam akuntabilitas, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan juga pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan digunakan Lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Pemerintah sangat berperan penting bagi akuntansi sektor publik karena termasuk entitas yang sangat besar. Seperti yang kita tahu, bahwa negara kita adalah negara hukum yang tentunya memberi tuntutan terhadap Lembaga publik masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, untuk memberikan informasi keuangan lagi yang membutuhkan dan juga dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab dari tugas atau kewajiban yang sudah dilakukan. Akuntabilitas biasanya terkait dengan akuntansi dan manajemen dalam perusahaan. Akuntabilitas memiliki prinsip utama yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media untuk melaporkan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas tuntutan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Apabila memenuhi suatu prinsip

dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka akuntabilitas kinerja dapat tercapai.

Dilihat dari fenomena saat ini, bahwasanya akuntansi sektor publik masih jarang dilakukan, begitupun dengan tingkat akuntabilitas yang masih rendah, karena tujuan yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan, ukuran keberhasilan yang tak layak untuk di ukur. Program kegiatan ini ditetapkan tidak sesuai dengan sasaran. Hal ini menunjukkan fenomena yang menyebabkan adanya tuntutan suatu pertanggungjawaban baik secara individu ataupun penguasa, karena pada dasarnya akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari sebuah kegagalan atau keberhasilan suatu misa.maka dipandang perlu adanya penerapan akuntansi sector publik serta dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan – urusan pemerintah dapat optimal.

Pentingnya akuntabilitas semakin diperlukan seiring dengan proses globalisasi yang menuntut pemerintah untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam peningkatan kinerja sektor pelayanan publik. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap sektor pelayanan publik, maka diharapkan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah kepada masyarakat harus semakin memuaskan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda seperti dari Pebri Asari Putra (2021) mengatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian yang ditemukan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh penerapan Akuntansi sektor publik terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
3. Menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Sebagai salah satu sumber gagasan bagi instansi Pemerintah pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut.

#### **E. Lingkup Pembahasan**

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada mengamati dan mengkaji apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi sector publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih memudahkan dalam memahami hal yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan ini, maka penulis menguraikan secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Dalam Bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka piker, dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan definisi oprasional.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, merupakan bagian hasil serta pembahasan. Hasil penelitian meliputi, pemaparan data, temuan penelitian dan pembahasan data.

### BAB V PENUTUP

Bab kelima, merupakan bagian kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti menyimpulkan beberapa hal penting dan juga memberikan saran kepada pembaca mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

###### **a. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (LAN,2023). Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Mardiasmo, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah

ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

**b. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut LAN (2003) pedoman penyusunan pelaporan AKIP tercantum juga bahwa pelaksanaan AKIP harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip yang lazim dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan harus disusun secara jujur,

objektif, dan transparan. Menurut Indra Bastian (2001) prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut:

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (*adanya responsibility center*), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (*conrollable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporannya.
- 2) Prinsip Pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/skema/*budget*, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.
- 3) Prinsip manfaat, yaitu laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya.

Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2012 pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
- 2) Prinsip prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak selanjutnya.

- 3) Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

**c. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (PEMDA) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemerintah dalam penelitian Nur Heni Safitri (2020), yaitu:

- 1) Penetapan perencanaan strategik
- 2) Pengukuran kinerja
- 3) Pelaporan kinerja
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja

**2. Akuntansi Sektor Publik**

**a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Laporan pengelolaan keuangan ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik ini dapat digunakan sebagai alat transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud adalah lembaga pemerintah di daerah maupun pusat dan lembaga non-pemerintah, termasuk rumah sakit dan lembaga pendidikan.

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Akuntansi sektor publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, serta pembuatan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan/lembaga/organisasi baik itu swasta maupun negeri yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan untuk pihak-pihak yang membutuhkan pada saat mengambil sebuah keputusan.

**b. Jenis Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Purwaningrum (2018) akuntabilitas publik terdiri terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi, misalnya seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal

Pertanggung jawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Menurut Purwaningrum (2018) akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk semua tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk pemerintahan yang mana masing-masing pejabat ataupun pengurus publik baik kelompok maupun individu secara tingkatan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadap atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja aktivitas secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.

b) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan serta perkembangan yang akan dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

c. **Indikator Akuntabilitas Sektor Publik**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja. Indikator kinerja berupa:

- 1) Hasil (*outcome*) bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan Output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
- 2) Keluaran (*Output*) bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan *Input* (masukan) yang digunakan.

**d. Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

**e. Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik**

Standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan sebuah pedoman atau kerangka yang menjadi dasar berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggung jawaban publik.

## B. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Hawalya, 2023)Ba	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	Metode Kuantitatif	Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Maros. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
2	Oktaviani Aulia (2021)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru	Metode Deskriptif Kuantitatif	Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial dan simultan. Untuk pengawasan kualitas laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara determinasi diperoleh nilai R Square atau Koefisien Determinasi sebesar 33.3% yang berarti variabel penerapan akuntansi sektor publik dan

				pengawasan kualitas laporan keuangan mampu menerangkan atau menjelaskan pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Winda Riva Rahmawati, Heliana (2022)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Metode kuantitatif dan verifikatif.	Variabel penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang menunjukkan semakin diterapkan Akuntansi Sektor Publik maka semakin tinggi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya.
4	Intan Permata Haska Wina & Siti Khairani	Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, Dan	Metode Kuantitatif	Variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang didapatkan dari uji parsial untuk variabel x1 dengan nilai $2,326 > 2,037$ dengan signifikansi $0,027 < 0,05$ dan variabel x2 dengan nilai $4,946 > 2,037$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ , kemudian hasil dari uji simultan dengan nilai $29,506 > 3,285$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ . Berarti, jika standar pelaporan

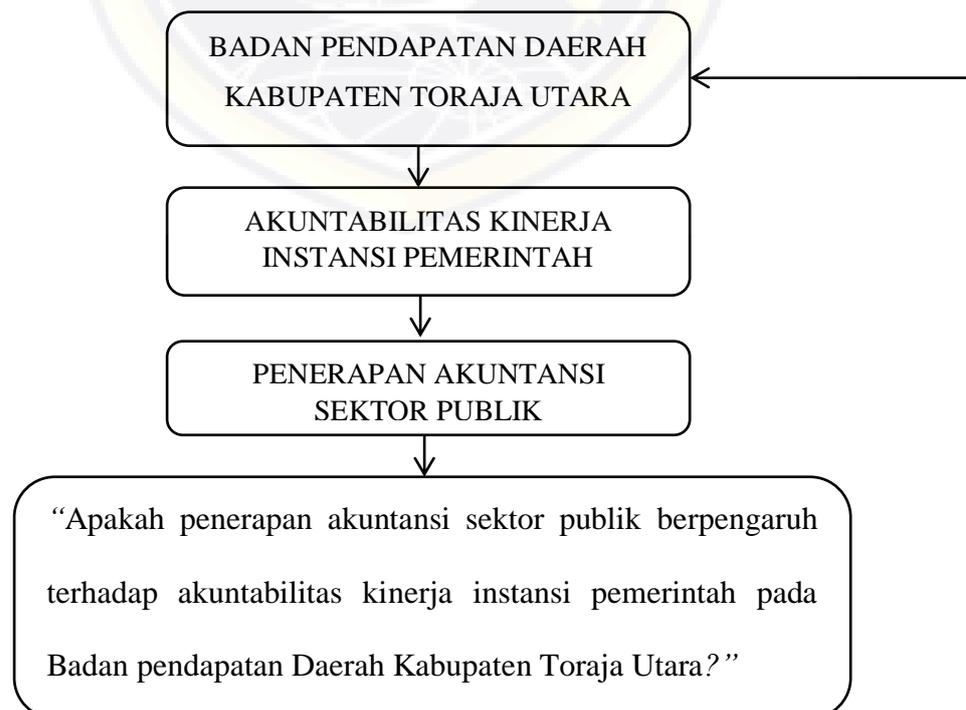
		Dishub Prov)		akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan maka akan menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.
5	Hendrianto, Sakti Alamsyah, dan Andri Indrawan (2022)	Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah	Metode Kuantitatif	Penerapan Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Selanjutnya pengendalian Intern (X2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kecamatan Lembursitu Berpengaruh Signifikan. penerapan Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Selanjutnya pengendalian Intern (X2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

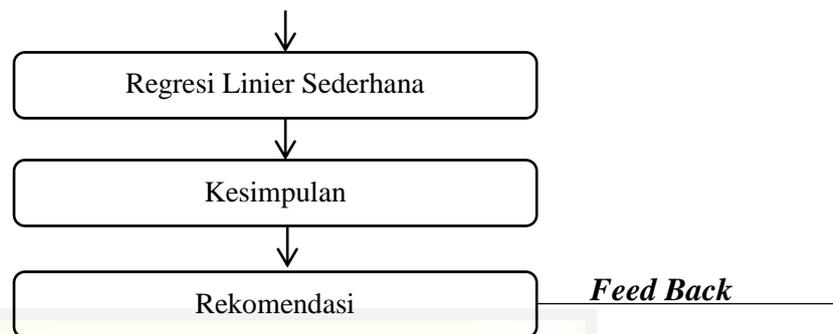
				<p>Pemerintah (Y). Disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kecamatan Lembursitu Berpengaruh Signifikan.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini digambarkan dalam Kerangka Pikir sebagai berikut:

**GAMBAR 2. 1 Kerangka Pikir**





Dari kerangka teori di atas terdapat lokasi penelitian yang akan di lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara dimana penelitian ini akan melihat variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah dapat dipengaruhi oleh Penerapan Akuntansi Sektor Publik. Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah “Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada badan pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara?” dengan metode kuantitatif untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah terdapat pemecahan masalah peneliti melakukan kesimpulan dan dapat menjadi rekomendasi bagi instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pikir yang di buat maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

$H_0$  : Penerapan Akuntansi Sektor Publik tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$H_1$  : Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiono, 2018). Adapun tujuan dari analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistic data dalam bentuk angka yang digunakan yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2016), penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode kausal komparatif (*causal-comparative research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat dan pengaruh antara dua variable atau lebih.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di badan pendapatan daerah kabupaten Toraja utara yang terletak di Jl. Poros Rantepao-Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 2 bulan yang dimulai pada bulan juni sampai juli 2023.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 35 OPD. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Pengukuran sampel ialah suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang telah didapatkan dalam suatu penelitian. Peneliti sadar bahwa pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu penelitian maka peneliti memilih sampel di Badan Pendapatan Daerah yang berjumlah 35 OPD.

### **D. Instrumen Penelitian**

Pada prinsipnya melakukan adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasa dinamakan instrument penelitian. Menurut sugiono (2019), Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian yaitu angket. Angket merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

## **E. Variabel Penelitian**

Variabel dari suatu penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis (kesimpulan atau dugaan sementara). Artinya menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris yang ada di dalam dunia nyata. Untuk itu variabel dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, *prediktor*, *antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya (pengaruhnya) dengan variabel lain. Untuk itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X).

### **2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output, kriteria, konsekuen, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Untuk itu variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

## **F. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi/badan berupa angka atau bilangan sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai hal yang ingin diketahui.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini ialah data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Data primer yang diolah berupa angka didapatkan dari skala kuesioner yang peneliti sebarakan kepada responden yang selanjutnya diolah menggunakan software SPSS 23. Kuesioner yang peneliti bagikan kepada responden merupakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Sumber dari penelitian ini adalah seluruh OPD yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini antara lain:

### **1. Observasi**

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada SKPD pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis.

### **2. Kuesioner**

Kuesioner merupakan Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono). Berdasarkan pengertian di atas, maka data dalam penelitian ini

didapatkan dikarenakan penelitian terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan atau disebut juga data primer.

Selanjutnya, penelitian melakukan pengambilan data secara langsung pada objek penelitian dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden yang telah dijadikan sampel. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh responden yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **3. Studi Pustaka**

Menurut Sugiono, studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data didapatkan dengan melakukan studi penelahan terhadap buku-buku literatur, catatan dan laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti memperoleh data kepustakaan berasal dari jurnal-jurnal, buku, maupun penelitian sejenisnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

### **H. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kualitas data. Metode ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh antara beberapa variabel *independent* dan variabel *dependent*.

## 1. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.

## 2. Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel tersebut adalah variabel dependen (yy) atau disebut juga dengan variabel respon dan variabel independen (xx) atau disebut juga dengan variabel prediktor atau variabel penjelas. Skala data yang digunakan dalam regresi linier sederhana adalah interval atau rasio.

Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent)

a = konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y secara bersama-sama dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka hipotesis didukung yaitu, variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

#### b. Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi)

Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi) digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (*variable dependent*). Nilai koefisien determinasi diantara 0 hingga 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini dapat disimpulkan, jika  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika  $R^2 = 0$  maka menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### I. Definisi Operasional

Defenisi oprasional menjelaskan hal tertentu yang digunakan dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik

## **1. Penerapan Akuntansi sektor publik**

Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah sistem Akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel

## **2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ialah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Toraja Utara awalnya pada tahun 2008 bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang DPPKAD lebur atau dibagi menjadi dua bagian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

#### **1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara**

Visi dari BAPENDA adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber pendapatan daerah;

- f. Meningkatkan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- g. Meningkatkan kinerja pengalokasian belanja daerah secara efisien, efektif, dan transparan berdasarkan skala prioritas;
- h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan konsultasi terhadap sumber-sumber keuangan daerah

## **2. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara**

Lokasi tempat penelitian yakni pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang beralamat di Jl. Poros Rantepao-Tondon, Kabupaten Toraja Utara

## **3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara**

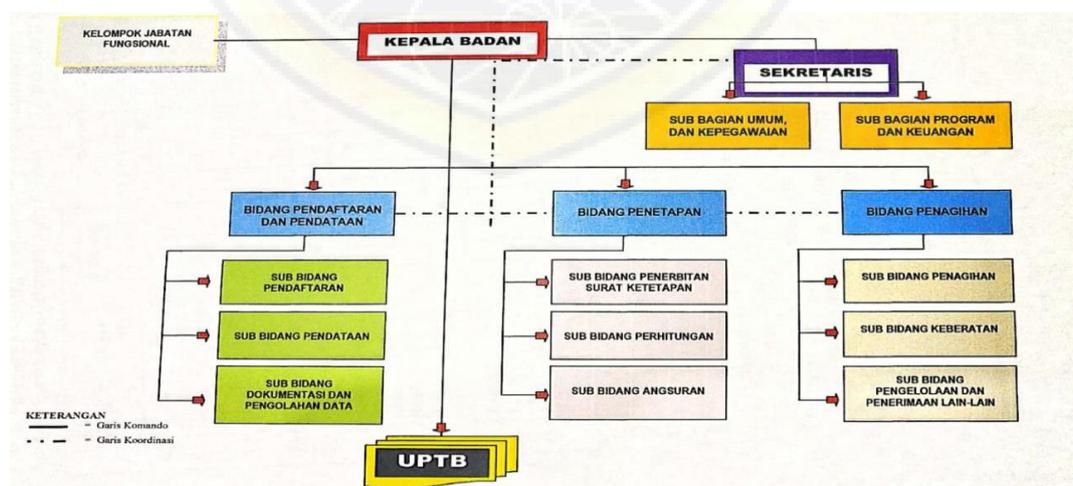
Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara. maka struktur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
  - a) Sub Bidang Pendaftaran

- b) Sub Bidang Pendataan
- c) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data
- 4. Bidang Penetapan
  - a) Sub Bidang Penerbitan Surat Ketetapan
  - b) Sub Bidang Perhitungan
  - c) Sub Bidang Angsuran
- 5. Bidang Penagihan
  - a) Sub Bidang Penagihan
  - b) Sub Bidang Keberatan
  - c) Sub Bidang Pengelolaan dan Penerimaan Lain-Lain
- 6. Jabatan Fungsional
- 7. UPTB

Untuk lebih jelasnya,berikut disajikan gambar struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

**GAMBAR 4. 1 Struktur Organisasi**



Sumber : Bapenda, 2023

#### **4. Bidang Usaha/ Bagian**

Masing-masing bagian Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah tugas dari masing masing bagian organisasi :

##### **a. Kepala Badan**

Berikut tugas Kepala Badan, meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas:
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya:
- 6) Merumuskan kebijakan penvelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 7) Melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak di: rerrihusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:

- 8) Memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah:
- 9) Melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, konsolidasi, rekonsiliasi, analisis verifikasi serta pembidanan dibidang pendapatan daerah:
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 11) Melaksanakan administrasi badan pendapatan daerah:
- 12) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan:
- 13) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan:
- 14) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan:
- 15) Melaksanakan koordinasi pengalokasian, penyusunan, perencanaan, penyediaan serta evaluasi dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 16) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pendapatan daerah:
- 17) Melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, konsolidasi, rekonsiliasi, analisis verifikasi serta pembinaan dibidang pendapatan daerah:
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan

evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:

- 19) Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis badan pendapatan daerah :
- 20) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi :
- 21) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan: dan
- 23) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### b. Sekretariat

Uraian tugas sekretaris meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi perunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas.

- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Mengoordinir penyusunan sop seriap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian.
- 7) mengoordinir penyusunan lakip badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
- 8) Mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah dan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan badan.
- 9) Menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- 11) Melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- 13) Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi Badan.
- 14) Mengoordinasikan pelaksanaan. Pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Badan:

- 15) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana.
- 16) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- 17) Melaksanakan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 18) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan: kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian.

Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
7. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian.
8. Menghimpun daftar hadir pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi.
9. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedia lengkap dan akurat.
10. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian.
11. Melakukan administrasi, pengirsipan naskah dinas, pengklarifikasian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali.
12. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai

bahan dalam formasi pegawai.

13. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi penilaian pelaksanaan pekerjaan jabatan/on the job training.
14. Melakukan kegiatan keprotokoleran lingkup Badan.
15. Mengoordinasikan penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan Badan.
16. Melakukan pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Badan.
17. Melakukan kegiatan kehumasan dan publikasi serta mengoordinasikannya dengan unsur dalam lingkup Badan maupun luar Badan.
18. Menyediakan dan melaksanakan administrasi perkantoran, penggandaan, pencetakan dan pengarsipan dokumen.
19. Memfasilitasi keamanan dan ketertiban lingkungan Badan.
20. Mengatur jam kerja serta mengawasi disiplin kerja pegawai.
21. Memfasilitasi pelayanan hukum dalam lingkup Badan.
22. Melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.
23. Menyusun daftar urut kepangkatan.
24. Membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan usulan pensiun.
25. Membuat dokumen penugasan pegawai.
26. Melakukan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja,

evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan formasi jabatan

27. Melakukan administrasi cuti pegawai.
28. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
29. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
30. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. Dan
31. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Subbagian Program

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan evaluasi laporan kinerja.

Tugas Subbagian Program, yaitu :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui pelaksanaan tugas.

- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
- 8) Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian.
- 9) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 10) Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan dilingkup Badan.
- 11) Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 12) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja.
- 13) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja.
- 14) Menyiapkan bahan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai landasan kinerja Pegawai.

- 15) Menyiapkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi.
  - 16) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan pertanggungjawaban pimpinan.
  - 17) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
  - 18) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
  - 20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris membantu Sekretaris dalam penatausahaan administrasi keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang keuangan serta aset.

Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset

Berikut uraian tugas Tugas Subbagian Keuangan dan Aset :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 7) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data keuangan untuk mendapatkan data yang akurat.
- 8) Melakukan pengendalian keuangan lingkup Badan yang terencana sebagai kontrol agar terhindar dari kesalahan.
- 9) Melakukan pengendalian pengeluaran kas (cash flow) sebagai kontrol terhadap transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas.
- 10) Menyusun dokumen terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup Badan.
- 11) Melakukan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Badan.
- 12) Melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi penggunaan,

pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran.

- 13) Melakukan penerimaan, penyimpanan dan penatausahaan seluruh pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 14) Menyusun dan menerbitkan dokumen yang diperlukan dalam pencairan dan pertanggungjawaban anggaran.
- 15) Meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran.
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian pemeliharaan, inventarisasi dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan benar.
- 17) Mengatur operasional kendaraan dinas, parkir, gedung kantor, perumahan dinas, asrama, dan halaman kantor.
- 18) Membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening berdasarkan pengeluaran SPM.
- 19) Melakukan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kesejahteraan pegawai.
- 20) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan.
- 21) Meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan.
- 22) Menyusun laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilingkungan

Badan.

- 23) Menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang.
- 24) Melakukan, mengelola dan mengawasi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan dari program bantuan.
- 25) Mengumpulkan dan mengolah data barang persediaan.
- 26) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 27) Melakukan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unsur lain dalam lingkup Badan maupun luar Badan dengan sepengetahuan atasan.
- 28) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 29) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 30) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- 31)

## **B. Deskripsi Data Responden**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara secara langsung. Jumlah kuesioner yang disebarkan

sebanyak 35 kuesioner. Peneliti menyajikan sebagai berikut :

**TABEL 4. 1 PENGEMBALIAN KUESIONER**

Keterangan	Jumlah
Penyebaran Kuesioner	35
Kuesioner yang kembali	24
Kuesioner yang dapat diolah	24
<b>Tingkat Pengembalian</b>	<b>68,5%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 35 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 24 kuesioner. Berdasrkan penelitian tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 68,5%. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara cukup tinggi.

#### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini peneliti menyajikan tabel responden berdasarkan umur :

**TABEL 4. 2 JENIS KELAMIN RESPONDEN**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-Laki	19	79%
Perempuan	5	21%
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis

kelamin perempuan yaitu sebanyak 19 responden (79%) dan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 responden (21%).

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini disajikan tabel responden berdasarkan jenjang pendidikan :

**TABEL 4. 3 PENDIDIKAN RESPONDEN**

<b>Pendidikan Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
D3	3	12,5%
S1	15	62,5%
S2	6	25%
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan mayoritas pada responden yang berpendidikan dengan kategori Diploma (D3) sebanyak 3 responden atau sebesar 12,5%, strata satu (S1) sebanyak 15 responden atau sebesar 62,5%, dan kategori strata dua (S2) sebanyak 6 responden atau sebesar 25%.

## 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan masa kerja :

**TABEL 4. 4 MASA KERJA**

<b>Masa kerja</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
6-10 tahun	4	16%
11-15 tahun	15	63%
16-20 tahun	4	17%
≥21 tahun	1	5%



- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.5 data di atas, diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 200. Maka dari itu, nilai signifikansi lebih besar daripada alpha 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian uji asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi dalam penelitian.

#### D. Uji Analisa Regresi Linier Sederhana

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh modal terhadap pendapatan . Statistical Package For Social Science (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear sederhana.

**TABEL 4. 6 Uji Regresi Linier Sederhana**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.807	9.576		2.904	.008
	PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	.658	.316	.406	2.081	.049

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sumber : Data Primer yang diolah,2023

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (a) sebesar 27.807, sedangkan nilai penerapan akuntansi sektor publik (b/koefisien regresi) sebesar 0,658 dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y=a+bX+e$$

$$Y=27.807+0,658X$$

Hasil persamaan diatas dapat diterjemahkan konstanta sebesar 27.807 yang mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 27.807 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai akuntansi sektor publik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan bertambah sebesar 0,658. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh akuntansi sektor publik (variabel X) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (variabel Y) adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas sebesar  $0,049 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntansi sektor publik (X) berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

## E. Hasil Uji Hipotesis

### 1. Hasil Uji F

Pada penelitian hasil uji F dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23. Tujuan dari hasil uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*. Dengan kriteria pengujian tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau nilai signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ). Jika nilai signifikasinya  $> 0,05$   $H_0$  ditolak dan jika nilai nya  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Untuk lebih jelasnya, hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 4. 7 Hasil Uji F**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.783	1	28.783	4.332	.049 <sup>b</sup>
	Residual	146.175	22	6.644		
	Total	174.958	23			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

b. Predictors: (Constant), PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

*Sumber : Data Primer yang diolah,2023*

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji F diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 4,332 >  $F_{tabel}$  sebesar 3,44 dan nilai P value sebesar 0,049<sup>b</sup> lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis H1 diterima.

## 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

**TABEL 4. 8 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.406 <sup>a</sup>	.165	.127	2.57766

a. Predictors: (Constant), PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

*Sumber : Data Primer yang diolah,2023*

Dari hasil Tabel 4.14 menjelaskan bahwa besarnya nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,406. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,165 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Akuntansi Sektor Publik) terhadap variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sebesar 16,5%.

## F. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian dari 24 orang yaitu pegawai pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 24 OPD sebagai responden. Diketahui bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah , artinya jika akuntansi sektor publik penerapannya tidak dilakukan secara baik dan benar maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini diperkuat dan didukung oleh nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha yaitu  $0,049 < 0,05$  artinya akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.. Hasil dari penelitian ini didukung oleh bukti empiris dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Hawalya (2023) . Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh maka peneliti menyimpulkan penerapan Akuntansi sector publik berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah peneliti menyadari bahwa masih banyaknya terdapat keterbatasan pada penelitian ini, maka dari itu peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja agar terus meningkatkan penerapan akuntansi sektor publik agar dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
1. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel penelitian diluar dari variabel yang telah diteliti sehingga dapat meningkatkan penelitian yang menjelaskan dengan penelitian ini sehingga diharapkan mampu menambah referensi serta memperluas objek penelitian baik itu di pemerintahan maupun swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansharullah, K. (2017, Januari). Pengaruh Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. *Ecomomis Bosowa Journal*, 3, 117-126.
- Apriliani, Triana Sukma (2022) *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo*. Undergraduate Thesis, Politeknik Negeri Jember.
- Cantika, Yulia. (2018). "*Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Deni Harianto, K. A. (2021, Agustus 22). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6, 122-139.
- Evada Dewata, Y. S. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8, 541-550.
- Hawalya, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. *Skripsi Universitas Bosowa*.

Hafzhan, Muhammad (2021) *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hasanah, Atikah. 2021. “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Vi Medan)*”. Skripsi. Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Helin Gustri Mulya, E. F. (2022, Februari). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4, 192-212.

*Konsep dasar akuntansi.* (n.d.). Retrieved from [https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/84846/File\\_10-BAB-2-LANDASAN-TEORI.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/84846/File_10-BAB-2-LANDASAN-TEORI.pdf)

Pamungkas, B. (2012). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Imiah Rangga Gading*, 1-9.

Ristina, Wahyu. 2018. “*Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha*

*Perikanan Menengah Negeri Bone*). Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rio Pratama, H. A. (2019, Februari). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntans*, 1, 429-444.

Santoso, U. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Center For Business Studies FISIP UNPAR*, 14-33.

Sadeli, Y. A. (2018, Desember). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Permerintah Kota Makassar. *Jurnal Tangible*, 3(2), 169-183.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

 **UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568  
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

---

Nomor : A.0867/FEB/UNIBOS/V/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian & Pengambilan Data

Kepada Yth,  
**Kepala Badan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara**

Di,-  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Irpan Tandibua  
NIM : 4519013037  
Program Studi : Akuntansi  
No. Hp : 085342957835

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Mei 2023  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
  
**Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM**  
NIDN. 0972412680

Tembusan  
1. Rektor Universitas Bosowa  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Rante Kesu' No.2 Rantepao Telp. : (0423) 2922333 Email : dpmptsp.torut@gmail.com  
Website : http://dpmptsp.torajautarakab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor: 226/SRP/DPMPTSP/VI/2023

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Nomor :  
A.0867/FEB/UNIBOS/V/2023, Perihal Izin Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian

a.n :  
Nama : **Irpan Tandibua'**  
Nomor Pokok : **4519013037**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Alamat : **Darra**

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul:  
**Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara** yang dilaksanakan  
terhitung mulai tanggal **23 Juni 2023** sampai **23 Agustus 2023**, pada prinsipnya kami  
merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil "Pengambilan Data Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Tidak semua data dapat diserahkan kepada pemegang rekomendasi.
3. Pengambilan Data Awal tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
4. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
5. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang rekomendasi tidak menaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 22 Juni 2023

KEPALA DPMPTSP,

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Ir. HARLI PATRIATNO, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19670503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa di Makassar;
5. Peringgal;



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Poros Rantepao-Palopo KM 4, Lembang Tonjon Kecamatan Tondon

**SURAT PERNYATAAN**  
NOMOR : 973.135/BAPENDA/VI/2023

Berdasarkan Rekomendasi Kepala DPMTSP Nomor: 226/SRP/DPMTSP/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Paris Salu,SH.,M.Si  
Nip : 19670705 200701 1 042  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menerima **Sdr. Irpan Tandibua'** untuk melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, 26 Juni 2023

Kepala Bapenda,



**Drs. Paris Salu, SH.,M.Si**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19670705 200701 1 042

## Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Para Responden yang Terhormat, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini. Adapun kami sampaikan kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Irpan Tandibua'

NIM : 4519013037

Jurusan/Fakultas : Akuntansi S1/Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Universitas Bosowa Makassar

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA”**.

Dalam penyusunan skripsi ini besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk berkenan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat anda bekerja. Data yang kami peroleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Irpan Tandibua'



## A. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi daftar pertanyaan berikut:

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
  - a. 20 – 30 tahun
  - b. 31 – 40 tahun
  - c. 41 – 50 tahun
  - d.  $\geq 50$  tahun
4. Pendidikan terakhir :
  - a. SMU/SMA/SMK
  - b. Diploma
  - c. Sarjana Pasca
  - d. Sarjana
5. Nama Dinas/Instansi :
6. Jabatan :
7. Bidang :
8. Masa Kerja :
  - a. 1 – 5 tahun
  - b. 6 – 10 tahun
  - c. 11 – 15 tahun
  - d. 16 – 20 tahun
  - e.  $\geq 21$  tahun

\*\* : boleh diisi dengan inisial maupun nama lengka

## **B. Daftar Pertanyaan**

Berikut ini adalah pernyataan mengenai “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara”

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan tanda check list (√) pada salah satupilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu/Saudara/i.

- |            |                                        |                 |
|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>SS</b>  | <b>: Sangat setuju</b>                 | <b>: Skor 5</b> |
| <b>S</b>   | <b>: Setuju</b>                        | <b>: Skor 4</b> |
| <b>N</b>   | <b>: Tidak ada pendapat/ ragu-ragu</b> | <b>: Skor 3</b> |
| <b>TS</b>  | <b>: Tidak setuju</b>                  | <b>: Skor 2</b> |
| <b>STS</b> | <b>: Sangat tidak setuju</b>           | <b>: Skor 1</b> |

### 1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik

	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap aset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.					
2.	Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas.					
3.	Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal, dapat dibandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan.					
4.	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.					
5.	Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.					

<p>6. Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur- unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan-catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur-unsur laporan keuangan.</p>					
<p>7. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik.</p>					

2. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No.	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		ST S	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi					
2.	Membuat perencanaan strategis					
3.	Mengembangkan berbagai indicator kinerja suatu program/ kegiatan/ proyek.					
4.	Pimpinan selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil suatu program/ kegiatan/ proyek.					
5.	Pimpinan dan staf mempertanggung jawabkan ( <i>accountable</i> ) hasil dari suatu program/ kegiatan/ proyek yang telah dilakukan.					
6.	Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/ kegiatan/ proyek.					
7.	Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya yang ada seperti dana, sumber daya manusia, dan waktu untuk digunakan dalam pengukuran kinerja					

8.	Pegawai selalu menerima pengakuan positif atau perannya dalam pencapaian tujuan strategis organisasi.					
9.	Menghubungkan antar a pencapaian kinerja suatu program/ kegiatan/ proyek dengan tujuan strategis organisasi.					
10.	Kurangnya intensif berupa imbalan atau pengakuan positif, tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi.					
11.	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/ kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					

### Lampiran 3 Data Hasil Penelitian Variabel

PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ( X )							Total
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
4	5	4	5	5	4	4	31
4	5	4	5	5	4	4	31
4	3	4	5	4	3	5	28
4	5	4	4	4	4	5	30
4	4	4	4	4	4	5	29
4	4	4	5	5	5	4	31
4	5	4	5	5	4	4	31
3	4	3	4	5	4	4	27
5	4	4	5	5	4	5	32
4	4	4	4	4	4	5	29
4	4	4	4	4	4	5	29
5	4	4	5	4	4	4	30
4	5	5	4	2	2	4	26
4	5	4	5	4	5	5	32
4	4	4	5	4	4	5	30
5	5	5	4	5	4	4	32
4	4	4	5	4	5	5	31
5	5	5	5	4	4	4	32
4	4	5	5	5	4	5	32
4	5	4	4	4	4	4	29
5	5	5	4	4	4	5	32
4	4	4	5	4	5	5	31
4	4	4	4	4	4	5	29
4	5	5	4	4	4	5	32
4	4	4	5	4	5	5	31
4	4	4	4	4	4	5	29
4	5	5	4	4	5	5	32

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)											Total
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	
5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	51
5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	53
4	5	3	4	4	4	4	4	4	2	4	42
5	5	4	4	4	5	5	5	4	2	4	47
4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	49
4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	46
5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	5	51
5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	3	47
5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	50
4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	44
5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	51
5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	45
4	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	45
4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	48
4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	50
4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	51
5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	50
4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	45
4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	5	46
5	4	4	2	4	3	5	4	4	5	5	45
5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	48
5	5	5	4	5	4	5	4	4	3	3	47
4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	46
4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	48

## Lampiran 4 Hasil Penelitian

### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.000000
	Std. Deviation	2.52100255
Most Extreme Differences	Absolute	0.133
	Positive	0.133
	Negative	-0.096
Test Statistic		0.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

#### b. Uji analisis linier sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.807	9.576		2.904	0.008
PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	0.658	0.316	0.406	2.081	0.049

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

c. Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.783	1	28.783	4.332	.049 <sup>b</sup>
	Residual	146.175	22	6.644		
	Total	174.958	23			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

b. Predictors: (Constant), PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Hasil Uji R

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.406 <sup>a</sup>	0.165	0.127	2.57766

a. Predictors: (Constant), PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## Lampiran 5 Tabel Uji F

### Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92